

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk Iran terdiri dari banyak etnis dan golongan mulai dari Kristen, Yahudi, Zoroastrian, Baha'is, Sunni, dan Syiah sebagai golongan penguasa. Namun, di antara golongan-golongan tersebut, kaum Sunni lah yang paling banyak ditindas oleh pemerintah Iran, dikarenakan perbedaan masalah aqidah antara Syiah dan Sunni.¹

Iran dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang menganut ajaran Syi'ah, yaitu sekitar 90% dari total populasi. Namun, meskipun mayoritas, kaum Sunni yang berjumlah sekitar 5-10% tetap ada dan menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas keagamaan mereka.²

Kebijakan pemerintah Iran terhadap minoritas Sunni didasarkan pada struktur konstitusional yang secara sistematis mengecualikan kelompok non-Syiah dari posisi-posisi kunci pemerintahan. Marginalisasi kaum Sunni Iran eksplisit pada tingkat tertinggi pemerintahan; warga Iran harus beragama Syiah untuk menjabat di berbagai kantor pemerintahan tingkat tinggi—termasuk Majelis Ahli, Dewan Kemudahan, dan Dewan Wali.

¹<https://www.eramuslim.com/tahukah-anda/iran-adalah-mayoritas-syiah-bagaimanakah-islam-sunni-di-iran/> diakses pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 17:36 WIB.

² *The Role of Sunnis in Shi'ite Iran: A Socio-Religious Perspective*, *Journal of Middle Eastern Studies*, vol. 38, no. 2, 2018, hlm. 148-163

Anggota semua kelompok agama minoritas, termasuk Muslim Sunni, dilarang dipilih sebagai presiden.³

Kebijakan diskriminatif ini diperkuat melalui berbagai regulasi operasional yang membatasi aktivitas keagamaan, pendidikan, dan sosial-ekonomi kaum Sunni. Human Rights Watch yang berbasis di New York menyatakan bahwa otoritas Iran mendiskriminasi minoritas Muslim, termasuk Sunni, membatasi partisipasi politik dan pekerjaan mereka serta melarang mereka membangun masjid di kota-kota besar.⁴ Kebijakan ini mencerminkan pendekatan sistematis pemerintah dalam memarginalisasi komunitas Sunni melalui jalur hukum dan administratif.

Dalam konteks terkini, minoritas etnis dan agama di Iran, khususnya minoritas Kurdi dan Baluch, telah terdampak secara tidak proporsional oleh tindakan keras pemerintah terhadap demonstran sejak 2022, sebagai hasil langsung dari diskriminasi yang telah berlangsung lama.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan diskriminatif pemerintah Iran semakin intensif, terutama terhadap kelompok minoritas yang sebagian besar beragama Sunni.

Di Iran terdapat sekitar 10.000 masjid Sunni. Dibandingkan dengan masjid Syiah yang berjumlah 60.000, sebenarnya berdasar

³ Human Rights Watch, "World Report 2024: Iran," Human Rights Watch, 2024, <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/iran>.

⁴ Human Rights Watch, "World Report 2024: Iran," Human Rights Watch, 2024, <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/iran>.

⁵ UN Fact-Finding Mission on Iran, "Report of the international independent fact-finding mission on the Islamic Republic of Iran," United Nations Human Rights Council, 2023.

rasio jumlah penganut, terdapat lebih banyak rumah ibadah buat kaum Sunni ketimbang buat pemeluk aliran mayoritas Syiah. Tapi menurut organisasi HAM Human Rights Watch, angka tersebut tidak sesuai.⁶

Dalam laporan tahunannya 2015 silam, HRW mencatat pemerintah kota tidak lagi mengizinkan pembangunan masjid Sunni di Teheran. Kepada televisi Perancis, France24, dua penduduk Sunni Iran mengklaim mereka harus beribadah di masjid rahasia jika tidak ingin beribadah di masjid Syiah.⁷ Pihak berwenang tidak akan mengizinkan mereka membangun satu masjid pun di ibu kota. Pihak berwenang Secara resmi, pemerintah mengatakan bahwa tidak ada masjid Sunni karena umat Islam harus bersatu, semua masjid adalah rumah Tuhan yang terbuka untuk Syiah dan Sunni.

Namun menurut laporan Deutsche Welle (2024), terdapat spekulasi bahwa alasan sebenarnya adalah karena pemerintah khawatir masjid akan digunakan oleh kaum radikal untuk merekrut pemuda yang frustrasi dengan ideologi Republik Islam, pihak berwenang mengizinkan rumah ibadah kecil untuk ibadah Sunni. Tidak seperti masjid, rumah ibadah sering kali merupakan properti

⁶ Deutsche Welle. "Idul Fitri dan Diskriminasi Muslim Sunni di Iran." *DW.com*, 10 April 2024. Diakses 23 Mei 2025. <https://www.dw.com/id/idul-fitri-dan-diskriminasi-muslim-sunni-di-iran/a-68772864#:~:text=Diperkirakan%2C%20Muslim%20Sunni%20mencakup%2010%20dari%20populasi,politik%20atau%20memiliki%20surat%20kabar%20atau%20majalah.>

⁷DW: Bagaimana Nasib Minoritas Sunni di Iran? <https://www.dw.com/id/bagaimana-nasib-minoritas-sunni-di-iran/a-18962977> diakses pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 16:50 WIB.

sewaan yang tersembunyi di lingkungan perumahan, bukan bangunan bergengsi dengan menara. Rumah ibadah biasanya tidak memiliki imam dan staf, atau instruksi agama selain salat.

Kaum Sunni menghadapi penganiayaan dan diskriminasi yang cukup besar di berbagai wilayah Iran, terutama dalam aspek kebebasan beragama, partisipasi politik, dan pembangunan rumah ibadah. Misalnya, di kota Teheran, pemerintah Iran tidak mengizinkan pendirian masjid khusus untuk Muslim Sunni, meskipun mereka merupakan kelompok minoritas yang signifikan secara demografis. Akibatnya, umat Sunni harus melaksanakan salat berjamaah di rumah atau tempat tidak resmi yang sering mendapat pengawasan ketat dari otoritas keamanan negara.⁸

Contoh lain dapat dilihat di Provinsi Sistan dan Baluchistan, daerah dengan mayoritas penduduk Sunni dari etnis Baluch. Di wilayah ini, aparat keamanan Iran sering melakukan penangkapan terhadap ulama Sunni, membatasi kegiatan keagamaan, serta mengintervensi isi khutbah Jumat. Dalam beberapa kasus, pelanggaran ini disertai dengan penahanan tanpa proses hukum yang adil. Amnesty International mencatat bahwa praktik ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama yang dijamin oleh hukum internasional dan Konstitusi Iran sendiri.⁹

⁸ Human Rights Watch, *World Report 2021: Iran*, diakses 23 Mei 2025, <https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/iran>.

⁹ Amnesty International, "Iran 2022," dalam *Annual Report: The State of the World's Human Rights*, diakses 23 Mei 2025, <https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/>.

Laporan tahunan dari Human Rights Watch (2021) juga mengungkap bahwa pemerintah Iran secara sistematis menolak memberikan izin pendirian masjid bagi komunitas Sunni di ibu kota dan kota besar lainnya, serta menyensor atau melarang penyebaran literatur keagamaan Sunni. Sementara itu, laporan PBB tahun 2023 dari Pelapor Khusus untuk Iran menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi dan jabatan publik bagi kaum Sunni juga dibatasi, meskipun secara hukum mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara.¹⁰

Diskriminasi terhadap etnis minoritas telah berlangsung lama di Iran. Selama masa pemerintahan Shah, jutaan orang Kurdi, Turki, Arab, Baluchi, dan Turkmenistan dirampas haknya untuk belajar dalam bahasa ibu mereka, dan tidak ada ekspresi budaya atau publikasi yang diizinkan dalam bahasa mereka. Pengajaran ideologi Sunni dilarang di sekolah negeri. Di sekolah Sunni swasta, kurikulum diatur dan dikelola oleh dewan pemerintah yang mencakup perwakilan Pemimpin Tertinggi Syiah Iran. Justru karena diskriminasi ini, banyak aktivis etnis minoritas bergabung dalam revolusi, tetapi merasa sangat dikhianati ketika pemerintahan Islam yang baru melanjutkan kebijakan represif yang sama.¹¹

Kelompok etnis minoritas secara rutin ditolak kemampuannya untuk mengekspresikan warisan budaya mereka,

¹⁰ United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran*, A/HRC/52/67, Maret 2023, <https://undocs.org/en/A/HRC/52/67>.

¹¹ Benjamin, Medea. *Di dalam Iran*. (New York: OR Books, 2018), hlm. 79.

mencari perumahan dan pekerjaan yang layak, atau mencalonkan diri untuk jabatan politik.¹² Dalam kekuasaan Iran, tak pernah ada ceritanya, orang Sunni duduk dalam kursi pemerintahan. Baik itu untuk menteri atau bahkan sekadar calon presiden belaka. Ini terjadi sejak Revolusi Iran yang mengintegrasikan golongan Sunni ke dalam kaum minoritas. Dalam konstitusi Iran, sudah disepakati, presiden Iran haruslah seorang penganut Syiah. Syiah, tak pelak, telah membuat kaum Sunni menjadi sangat inferior.

Akses terbatas terhadap pendidikan dan pekerjaan terus berlanjut dan menyebabkan siklus ketidakstabilan ekonomi dan marginalisasi bagi kelompok minoritas. Kaum Sunni juga telah menyuarakan keprihatinan mengenai pembatasan yang dilaporkan pada pembangunan masjid Sunni di daerah-daerah mayoritas Syiah, termasuk ibu kota Teheran, dan eksekusi atau eksekusi yang akan segera dilakukan terhadap aktivis Sunni yang dituduhkan pemerintah terlibat dalam kegiatan-kegiatan terkait teroris.

Namun setiap kali dari kelompok minoritas ini menyuarakan pelanggaran hak-hak mereka, pemerintah sering kali menanggapi dengan penangkapan sewenang-wenang, pengadilan yang tidak adil, pemenjaraan, penyiksaan, dan dalam beberapa kasus keprihatinan mengenai hukuman mati.

Rezim Iran umumnya memandang minoritas Sunni dan para pemimpin agama di negara itu melalui lensa kecurigaan dan menganggap mereka sebagai kelompok oposisi atau orang luar. Selain itu, karena salah satu prinsip revolusioner dan keagamaan

¹² *Ibid.*, hlm. 66.

utama dari para ulama yang berkuasa di Iran adalah mengekspor ideologi Syiah, kelompok-kelompok non-Syiah umumnya dianggap sebagai saingan, konspirator atau ancaman untuk mencapai tujuan ideologis rezim tersebut. Akibatnya, tidak mengherankan bahwa, meskipun Sunni merupakan sekitar 10 persen dari populasi Iran, tidak ada Sunni yang ditunjuk untuk posisi pemerintahan tingkat tinggi sejak berdirinya rezim tersebut pada tahun 1979.

Para pemimpin agama dalam komunitas Sunni telah dilecehkan, ditahan, ditangkap, dan bahkan dieksekusi karena menjalankan kepercayaan mereka. Setidaknya 120 orang Sunni dipenjara karena keyakinan mereka pada tahun 2016. Pada bulan Agustus 2016, 22 dari mereka dieksekusi setelah pengadilan yang tidak adil yang menghukum mereka atas moharebeh, yang berarti "permusuhan terhadap Tuhan," dan tuduhan samar-samar tentang keterlibatan dengan kegiatan teroris. Pihak berwenang Iran telah menolak untuk mengizinkan penyelidikan oleh pelapor khusus PBB.

Pada bulan Oktober 2012, aktivis Sunni menyampaikan surat terbuka kepada pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, untuk menuntut diakhirinya diskriminasi. Komunitas Sunni menyambut baik terpilihnya Presiden Rouhani pada tahun 2013 karena kampanyenya mencakup janji untuk mengatasi diskriminasi, tetapi sangat sedikit yang berubah.¹³

¹³ Benjamin, *op. cit.*, 80.

Bahkan di bawah apa yang disebut pemerintahan moderat, hak-hak warga Sunni dan para pemimpin mereka belum membaik. Menurut laporan terbaru oleh Komisi AS tentang Kebebasan Beragama Internasional: “Penganiayaan Iran terhadap Muslim Sunni juga berlanjut pada tahun 2021. Pada Malam Tahun Baru 2020, pemerintah mengeksekusi tiga tahanan politik Muslim Sunni di penjara Vakilabad tanpa memberi tahu keluarga mereka sebelumnya. Pada bulan Januari, pemerintah menghancurkan fondasi sebuah masjid Sunni di Iranshahr, dan juga dilaporkan menghentikan pembangunan dua masjid Sunni baru di wilayah tersebut. Pada bulan Maret, pihak berwenang menangkap seorang penulis dan penerjemah Sunni dan mengirimnya ke penjara Zahedan. Pada bulan yang sama, Pengadilan Revolusi Urmia menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada seorang pria Muslim Sunni atas tuduhan menjadi anggota kelompok Salafi.¹⁴

Hal ini disebabkan oleh kurangnya keadilan dan proses hukum dalam sistem peradilan Iran, serta tuduhan yang dibuat-buat dan ambigu oleh rezim terhadap banyak warga Sunni. Pasal-pasal konstitusional yang menjamin hak-hak warga Sunni tampaknya hanya kedok untuk menipu masyarakat internasional agar percaya bahwa para pemimpin Iran menghormati kebebasan beragama dan hak asasi manusia semua kelompok, terlepas dari latar belakang etnis atau agama mereka.

¹⁴ Arab News : Warga Sunni Iran hadapi penindasan lebih lanjut di bawah Raisi <https://www.arabnews.com/node/2017801> diakses pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 16:41 WIB.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana kaum Sunni bertahan dalam lingkungan yang dominan Syi'ah, serta strategi-strategi yang mereka gunakan untuk menjaga eksistensi dan keberagaman agama di tengah mayoritas yang ada.

Manfaat penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap kajian ilmu sosial, politik, dan keagamaan, khususnya dalam memahami dinamika hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas di masyarakat yang plural. Dengan meneliti eksistensi kaum Sunni di Iran yang mayoritas Syi'ah, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang pluralisme agama, toleransi antar kelompok, serta konflik sektarian yang sering terjadi dalam konteks Timur Tengah.¹⁵ Penelitian ini juga bermanfaat untuk memahami hubungan politik antara pemerintah Iran yang mayoritas Syi'ah dengan kaum Sunni yang menjadi kelompok minoritas. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan peran kaum Sunni dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Iran, serta tantangan yang mereka hadapi dalam mempertahankan hak-hak mereka di negara yang didominasi oleh Syi'ah.¹⁶

Oleh karena itu, dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengkaji atau memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh kaum Sunni di Iran, serta bagaimana mereka berusaha mempertahankan identitas dan hak-hak mereka di tengah

¹⁵ *Religious Minorities in Iran: The Case of Sunnis, Middle East Journal*, vol. 64, no. 3, 2010, hlm. 341-357.

¹⁶ *The Sunni Minority in Shi'ite Iran, International Journal of Middle East Studies*, vol. 47, no. 4, 2015, hlm. 615-632.

tekanan yang ada.¹⁷ Dengan judul: **EKSISTENSI SUNNI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH SYIAH IRAN TERHADAP MINORITAS SUNNI**

B. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan judul diatas, agar pembahasan mengenai permasalahan pada penelitian ini tidak melebar, maka penulis perlu pembatasan masalah untuk mendapatkan hasil yang sesuai, terarah, fokus, dan mencapai pemahaman yang diinginkan. Penulis hanya menjelaskan mengenai Eksistensi Kaum Sunni di Iran yang Mayoritas Syiah, Penulis tidak membahas kepada doktrin-doktrin Sunni dan Syi'ah.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sejarah Kelompok Sunni di Iran?
2. Bagaimana Eksistensi Kelompok Minoritas Sunni di Iran?
3. Bagaimana Sikap Kebijakan Pemerintah Syi'ah terhadap kelompok Minoritas Sunni?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah perkembangan kelompok Sunni di Iran

¹⁷Zonis, Marvin. "The Political Economy of Islam in Iran." *Middle East Journal* 48, no. 1 (1994) 41-62.

2. Untuk menganalisis eksistensi kelompok minoritas Sunni di Iran.
3. Untuk mengkaji sikap dan kebijakan pemerintah Syi'ah Iran terhadap kelompok minoritas Sunni.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan yang terdiri dari dua macam, yaitu secara teoritis dan praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dapat digunakan menjadi acuan atau referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Diharapkan juga penelitian ini supaya bermanfaat dan berguna dan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan khususnya di bidang sejarah peradaban islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

- a Dapat menjadi suatu pelengkap data dalam penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pembahasan eksistensi Sunni di Iran: perspektif sejarah dan politik tentang kaum minoritas dalam dominasi mayoritas Syiah dalam pembahasan dan konsep yang berbeda. Sehingga dapat dijadikan sumber rujukan.
- b Dapat memperkaya dan menambah karya penulisan ilmiah di lingkungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya di Jurusan Sejarah Peradaban Islam.

- c Dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan gelar sarjana (S1) Jurusan Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri SiberInstitut Syekh Nurjati Cirebon.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai hubungan antara Sunni dan Syi'ah sudah tidak terdengar asing lagi. Menyikapi hal tersebut, melalui tinjauan pustaka ini dapat memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta terhindar dari adanya duplikat. Dalam mendukung penelitian ini, maka penulis mengambil beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk membedakan penelitian ini, yaitu:

1. Aji Cahyono, Muchamad Ridwan, *Islam Dalam Pusaran Konflik: Syi'ah dan Sunni di Era Dinasti Safawi*. Journal Of Integrative International Relations, Vol. 7, No. 1, Mei 2022. Penelitian ini mencoba menuliskan topik tentang Islam Dalam Pusaran Konflik antara Syi'ah dan Sunni pada Era Dinasti Safawi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: pertama, sebelum terbentuknya Dinasti Safawi, Islam dilanda konflik sektarian antara Syiah dan Sunni pasca meninggalnya Rasulullah karena dengan alasan umumnya masih memperdebatkan siapa yang pantas menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam. kedua, berdirinya Dinasti Safawi pada era Raja Ismail I menyebabkan aliran Sunni dan segala aktivitasnya dikonversi menjadi aliran Syiah di kawasan

Persia baik secara fiqh atau teologi. Persamaan dengan penelitian penulis ini sama-sama membahas tentang Sunni dan Syiah, khususnya dalam konteks konflik atau interaksi di wilayah yang mayoritas Syiah, yaitu Iran. Perbedaan penelitian dengan jurnal terkait yaitu penulis berfokus pada bagaimana Sunni mempertahankan identitas dan eksistensinya di negara mayoritas Syiah.

2. Ahmad Sahide, *konflik Syi'ah-Sunni Pasca-The Arab Spring*, Kawistara, Vol. 3, No. 3, 22 Desember 2013. Konflik yang memiliki akar historis yang cukup panjang. Benih-benihnya mulai tumbuh sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya, konflik ini adalah konflik politik, terkait siapa yang akan meneruskan kepemimpinan pasca wafatnya nabi. Namun demikian, konflik ini kemudian terseret dalam konflik akidah antara pengikut Ali (Syi'ah) dan pengikut Abu Bakar dan sahabat lainnya. Konflik ini memiliki dampak yang sangat besar dalam mewarnai perjalanan peradaban dunia Islam yang sulit dikompromikan hingga saat ini. Bahkan konflik ini turut mewarnai prahara politi di Timur Tengah, terutama dunia Arab, sejak bergulirnya *The Arab Spring* awal tahun 2011 lalu. *The Arab Spring* tidak hanya memomulerkan demokrasi dalam wacana politik Timur Tengah, tetapi juga sentimen Syi'ah-Sunni turut memanaskan suhu politik. Tulisan ini mencoba membaca sejarah dan perkembangan konflik politik Syi'ah-Sunni di Timur Tengah Kontemporer. Adapun persamaan dari jurnal ini yaitu sama-sama membahas konflik antara Syiah dan Sunni di Timur Tengah, termasuk dampaknya pada politik dan

hubungan internasional. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu lebih berfokus khusus pada Iran, yang mayoritas penduduknya adalah Syiah.

3. Wakhid Sugiyarto, *Kebijakan Keagamaan Terhadap Kelompok Minoritas Di Negara Republik Islam Iran*, Jurnal Harmoni, Vol. 16, No.2, Juli Desember 2017. Jurnal ini membahas bagaimana tentang kebijakan negara dalam pelayanan keagamaan terhadap kaum minoritas selain itu, dijelaskan pula masalah kebijakan politik keagamaan terhadap kaum minoritas, yang mencakup pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, bantuan keagamaan dari luar negeri, perkawinan berbeda agama, perayaan hari besar agama, perawatan dan pemakaman jenazah, penodaan agama, dan kebijakan terhadap kelompok sempalan. Dari penelitian ini munjukan bahwa pemerintah Iran terlihat memiliki kebijakan yang cukup baik terhadap kaum minoritas. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan penulis jurnal ini membahas posisi kelompok minoritas di tengah dominasi mayoritas, khususnya dalam konteks keagamaan di Iran, sama-sama mencakup bagaimana negara mayoritas Syiah memperlakukan kelompok Sunni sebagai minoritas di Iran. Perbedaan dalam jurnal ini membahas kebijakan negara terhadap berbagai kelompok minoritas, termasuk Kristen, Yahudi, Zoroaster, dan Sunni. Fokusnya lebih umum pada kebijakan keagamaan, sedangkan skripsi ini lebih spesifik pada eksistensi kaum Sunni dalam konteks mayoritas Syiah, termasuk bagaimana mereka bertahan dan menjalankan identitas keagamaan.

4. Buku ini ditulis oleh Samih Said Abud, terbit pada tahun 2014 yang berjudul "*Minoritas Etnis Dan Agama di Iran*" kota penerbit Jakarta, penerbit Pustaka Al-Kautsar. Buku ini menawarkan analisis mendalam mengenai berbagai kelompok minoritas, seperti Kurdi, Azeri, dan Baha'i, serta tantangan yang mereka hadapi dalam masyarakat yang didominasi oleh mayoritas. Penulis menjelaskan kondisi sosial dan politik, serta dampak kebijakan pemerintah terhadap hak-hak minoritas. Dengan menggunakan data historis dan data studi kasus, buku ini tidak hanya menjelaskan situasi terkini tetapi juga membahas dinamika identitas etnis dan agama. Relevansi buku ini dalam kajian sosial dan politik Iran sangat signifikan, memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai isu-isu minoritas. Secara keseluruhan, buku ini merupakan sumbangan penting bagi pemahaman tentang pluralisme di Iran dan tantangan yang dihadapi oleh minoritas etnis dan agama. Persamaan dari buku ini yaitu membahas eksistensi kelompok Sunni dalam konteks dominasi mayoritas Syiah di Iran, sama-sama menyoroti dinamika politik dan sosial di Iran, khususnya bagaimana pemerintah mayoritas Syiah memperlakukan kelompok minoritas, termasuk Sunni. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu lebih terfokus secara spesifik pada eksistensi dan pengalaman kelompok Sunni di Iran sebagai minoritas dalam mayoritas Syiah, dan skripsi ini juga berfokus pada kerangka akademis dengan pendekatan historis dan politik untuk memahami perjuangan dan marginalisasi kaum Sunni di Iran.

G. Landasan Teori

Berbicara mengenai sejarah eksistensi kaum Sunni di negara Iran yang mayoritas Syi'ah terkait topik penulis, maka ada beberapa teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu:

1. Kebijakan Publik

Sebagai suatu konsep, secara sederhana bisa menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah baik itu lembaga atau badan pemerintahan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik dengan menggunakan program-program atau bentuk upaya-upaya lainnya. Bila melihat konsep dari kebijakan publik tersebut, kebijakan memiliki makna atau arti yang luas tergantung bagaimana melihat atau mendeskripsikannya, beberapa ahli mendefinisikan bahwa kebijakan publik berupa serangkaian tindakan atau kegiatan, maupun keputusan yang dilakukan pemerintah atau mendeskripsikannya dengan cara yang berbeda-beda.

Perbedaan deskripsi dari kebijakan publik ini dapat dilihat dari bagaimana para ahli mendefinisikan kebijakan publik itu sendiri, seperti halnya Richard Rose yang menyatakan kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri, hingga Thomas R dye yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is whatever government choose to do or not to do”

(apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).¹⁸

Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu kebijakan publik juga kebijakan yang dikembangkan atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Implikasi pengertian dari pandangan ini bahwa kebijakan publik, yakni:

- a. Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang kebetulan.
- b. Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait.
- c. Bersangkutan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu.
- d. Bisa bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu dan bersifat negatif yang berarti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Kebijakan setidak-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan/undang-undang yang bersifat memaksa.¹⁹

¹⁸ Ismail Nawawi, Public Policy (Surabaya: ITS Press, 2014), hlm. 8.

¹⁹ James E. Anderson, Public Policy Making (New York NJ: Holt Reinhartnwinston, 2010), hlm. 13.

Kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Aktor mempunyai posisi yang amat strategis bersama-sama dengan faktor kelembagaan (institusi) kebijakan itu sendiri. Interaksi aktor dan lembaga inilah yang kemudian menentukan proses perjalanan dan strategi yang dilakukan oleh komunitas kebijakan dalam makna yang lebih luas.²⁰

2. Minoritas

Menurut Louis Wirth, seorang sosiolog Amerika, mendefinisikan minoritas dalam tulisannya *"The Problem of Minority Groups"* (1945) sebagai kelompok social yang memiliki posisi subordinat dalam masyarakat, baik secara politik, ekonomi, maupun social, dibandingkan kelompok mayoritas. Konsep ini tidak hanya didasarkan pada jumlah populasi, tetapi pada hubungan kekuasaan dan pengaruh antara kelompok tersebut dengan mayoritas. Ciri-ciri kelompok minoritas menurut Wirth: pertama adanya diskriminasi sosial dan politik yaitu minoritas sering menjadi korban perlakuan diskriminatif dari kelompok dominan. Ini mencakup pengucilan, prasangka, atau bahkan kekerasan. Yang kedua adanya identitas kolektif yaitu minoritas

²⁰ Muhlis Madani, Kebijakan Publik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 36.

memiliki kesadaran kelompok yang kuat karena pengalaman bersama atas perlakuan yang tidak adil, seperti perbedaan budaya, agama, atau etnis. Yang ketiga adanya ketidaksetaraan dalam kekuasaan yaitu minoritas biasanya tidak memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, kekuasaan, atau posisi strategis dalam masyarakat.²¹

3. Dominasi

Menurut James C. Scott, seorang antropologi dan ilmuwan politik terkenal, mempelajari dominasi sebagai hubungan kekuasaan yang asimetris antara kelompok dominan dan subordinat. Dalam bukunya *“Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance”* (1985) dan *“Domination and the Arts of Resistance”* (1990), Scott mengembangkan pemahaman tentang bagaimana dominasi bekerja tidak hanya melalui kekuatan fisik atau paksaan, tetapi juga melalui control ideologis, budaya, dan ekonomi. Konsep dominasi menurut James C. Scott: Dominasi sebagai control Struktural: yaitu dominasi mencakup kemampuan kelompok atau elit tertentu untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara mengendalikan institusi politik, ekonomi, dan social.²²

²¹ Wirt, Louis. *“The Problem Of Minority Groups”*. In *The Science of Man in the World Crisis*, edited by Ralph Linton, 347-372. New York: Columbia University Press, 1945.

²² Scott, James C. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale University Press.

H. Metode Penelitian

Dalam Metode penelitian terdapat dua istilah kata yaitu metode dan penelitian. Metode berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Metodas* yang artinya cara atau jalan yang mencapai sasaran atau tujuan dalam pemecahan suatu permasalahan. Kata yang mengikutinya yaitu penelitian, yang berarti suatu usaha untuk mencapai sesuatu metode tertentu, dengan cara hati-hati, sistematis dan sempurna terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.²³ Jadi, metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan ungkapan lain metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis metode-metode yang digunakan penelitian dalam penelitiannya.²⁴ Adapun beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Heuristik

Menurut terminologi heuristik dari Bahasa Yunani heuristiken yaitu mengumpulkan atau menemukan sumber, maksudnya dengan sumber atau sumber sejarah (Historical Sources) adalah sejumlah materi sejarah yang tersebar dan teridentifikasi.²⁵

Pengumpulan sumber sejarah merupakan hal yang penting untuk dijadikan sebagai data bagi sejarawan, sehingga seorang sejarawan dapat menjelaskan sumber yang dituliskan dalam

²³ Suyuti Pulungan, dkk, "Pedoman Penulisan Skripsi", Palembang : Fakultas Adab Humaniora, 2014, Hlm 21.

²⁴ Suyuti Pulungan, Op. Cit., hlm 21.

²⁵ Suhartono W. Pranoto, "Teori Dan Metodologi Sejarah", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, Hlm 29.

penelitian tersebut. Ketika seorang peneliti pasti memiliki kehati-hatian dalam mengumpulkan sumber sejarah yang akan diteliti dalam membuat rekonstruksi suatu peristiwa yang ada di masa lalu.²⁶

Dalam hal ini penelitian ini menggunakan sumber primer dari Laporan media cetak dan elektronik internasional yang terbit pada masa pasca-revolusi (1979–1990), seperti *The New York Times*, *The Guardian*, dan *Le Monde*, yang memberitakan kebijakan pemerintah Iran terhadap komunitas Sunni serta pelanggaran kebebasan beragama yang mereka alami.

Kemudian sumber sekunder yang digunakan ialah meliputi buku-buku, jurnal, berita sampai sumber-sumber yang kuat maupun penelitian terdahulu yang masih sejalan dengan penelitian ini.

2. Verifikasi (kritik)

Kuntowijoyo mengemukakan bahwa setelah melakukan penentuan topik atau pengumpulan data, peneliti diharuskan untuk menempuh tahapan verifikasi atau kritik data. Beberapa sumber yang diperoleh dari tahap heruistik ini kemudian di periksa keaslian dan keakuratan informasi. Verivikasi dibagi menjadi dua macam yaitu; autentisitas, atau keaslian sumber atau kritik eksternal guna menilai keaslian, dan akurasi sumber. Lalu kredibilitas, atau kebiasaan bisa dipercayai atau tidak.²⁷ Dengan demikian peneliti akan melakukan tahapan ini dengan

²⁶ Aditia Muara Padiatra, "*Ilmu Sejarah Metode dan Praktik*", Gresik: JSI Press, 2022, hlm 46.

²⁷ Kuntowijowo (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hlm.77.

memverifikasi keautentisitasan dan kredibilitas sumber primer dan sekunder yang digunakan penulis sebagai kunci untuk melakukan penelitian ini.

3. Interpretasi

Interpretasi diartikan dengan menafsirkan atau memberi makna terhadap fakta-fakta atau bukti-bukti tentang sejarah.²⁸ Dalam penelitian sejarah digunakan secara bersama tiga bentuk teknik dasar tulis menulis yaitu deskripsi narasi analisis.²⁹ Dalam tahapan ini, penulis mendeskripsikan hasil verifikasi terhadap data-data penelitian yang di dapat, selanjutnya di narasikan menggunakan analisis penulis sehingga dapat menjawab berbagai permasalahan dalam penelitian ini.

4. Historiografi

Setelah menyelesaikan penafsiran langkah selanjutnya yaitu tahap akhir yang dilakukan dengan menuliskan hasilnya. Penulisan sejarah (Historiografi) menjadi sarana komunikasi hasil penelitian yang diungkap diuji dan interpretasi. Tahapan ini merupakan akhir dari rangkaian metode penelitian sejarah, penulis harus menarasikan hasil penelitian yang telah dikumpulkan lalu diverifikasi dan diinterpretasikan kedalam tulisan.³⁰

²⁸ A. Daliman, Metode Penelitian Sejarah, Yogyakarta : Ombak, 2012, Hlm 81.

²⁹ Helius Sjamsudin, Metodologi Sejarah, Yogyakarta : Ombak, 2012 Hlm, 123.

³⁰ A. Daliman, Metode Penelitian Sejarah, Yogyakarta : Ombak, 2012, Hlm 99.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah susunan yang dibuat secara berurutan guna memudahkan persoalan-persoalan yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I memuat pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Poin-poin tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang mencakup seluruh penelitian sebagai dasar bagi pembahasan berikutnya. BAB II: Sejarah Sunni di Iran. BAB III: Perlakuan Pemerintah Syi'ah terhadap kelompok Sunni. BAB IV: Dampak perlakuan pemerintahan syi'ah terhadap keberadaan kelompok Sunni di Iran. BAB V: Kesimpulan

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SHEL
SYEKH NURJATI CIREBON

WISATA KEMAHMURAN